

HARMONISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN DENGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Supriyanto dan Subejo¹

PENDAHULUAN

Bagaimanapun juga dalam perumusan strategi serta implementasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat pedesaan, sektor pertanian masih merupakan tema sentral yang perlu mendapatkan perhatian dengan sangat serius dari para *stakeholders* Yang terkait. Meskipun kontribusi sektor pertanian tidak sebesar sektor industri dan jasa namun sektor pertanian menampung dan menghidupi petani dengan jumlah yang sangat signifikan. Dari data BPS tahun 2002 diketahui sektor pertanian Indonesia masih merupakan sumber penghidupan yang sangat penting karena masih memberikan lapangan kerja pada sekitar 39,7 juta (43,7%) dari sekitar 90,8 juta angkatan kerja di Indonesia.

Isu penguatan dan pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi namun terkait erat dengan aspek-apsek lainnya. Secara lebih jelas, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat tani, Mubyarto dan Santosa (2003) menyatakan bahwa pertanian (*agriculture*) bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Lebih dari itu, pertanian adalah cara hidup (*way of live*) bagi sebagian besar petani di Indonesia. Oleh karena itu pembahasan mengenai sektor dan sistim pertanian secara utuh, tidak saja petani sebagai *homo economicus*, melainkan juga sebagai *homo socius* dan *homo religius*. Konsekuensi pandangan ini adalah dikaitkannya unsur-unsur nilai sosial-budaya lokal, yang memuat aturan dan pola hubungan sosial, politik, ekonomi dan budaya ke dalam kerangka paradigma pembangunan sistem pertanian. Sehingga perencanaan terhadap perubahan kegiatan pertanian harus pula mempertimbangkan konsep dan dampak perubahan sosial-budaya yang akan terjadi.

¹Staf Pengajar Program Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta, Contact address: Subejo@lycos.com atau Subejo1972@yahoo.com

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Terminologi pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*). Dalam prakteknya seringkali terminologi-terminologi tersebut saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa.

Cook (1994) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Sedangkan Giarci (2001) memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan *collective action* dan *networking* yang dikembangkan masyarakat. Bartle (2003) mendefinisikan *community development* sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, *collective power*-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.

Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian *community development* dan *community empowerment*, secara sederhana, Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai **upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial**".

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat

diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

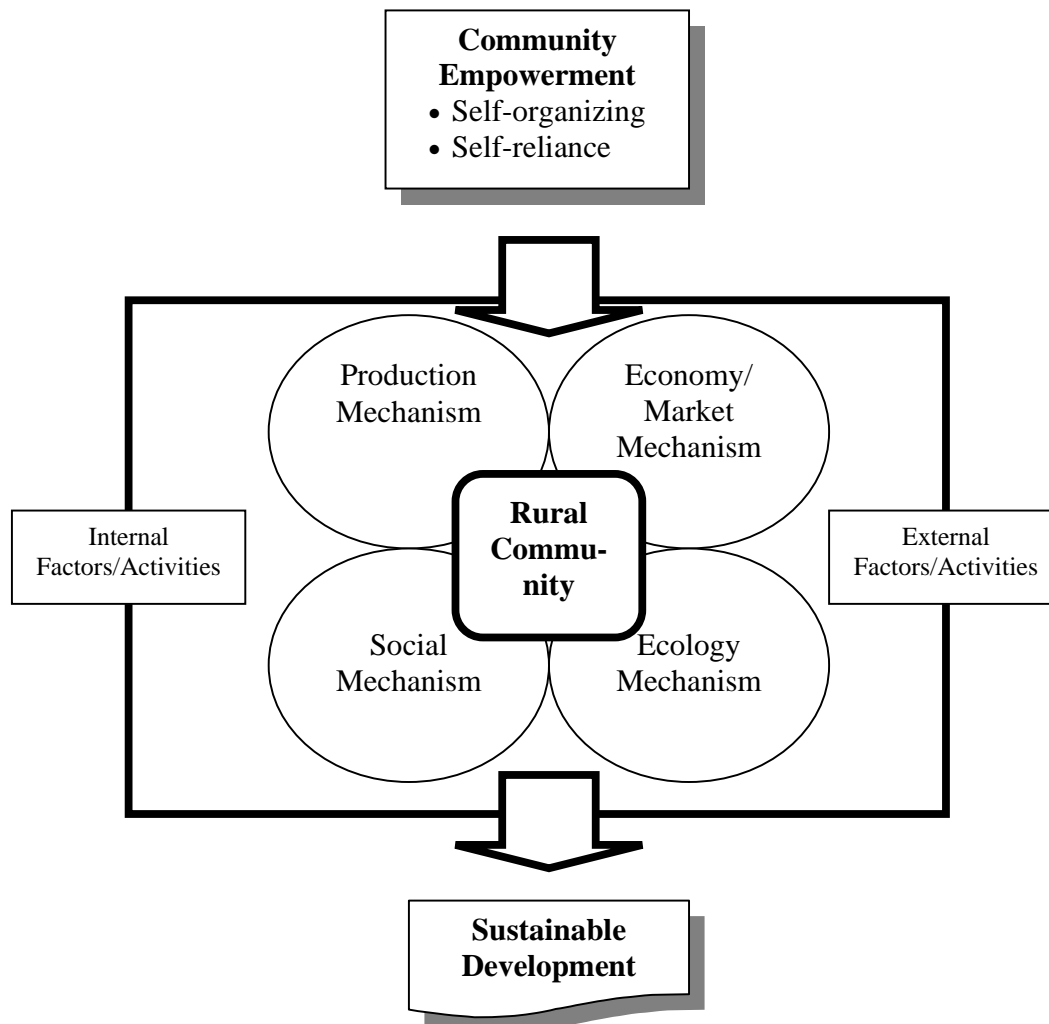
Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar *memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya*. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan *sustainable development* disajikan dalam Gambar 1.

Dalam hal **mekanisme produksi**, masyarakat memiliki asset/sumberdaya produksi yang antara lain mencakup lahan, ternak, modal, peralatan usaha tani serta tenaga kerja. Upaya pemberdayaan semestinya memfasilitasi dan mendorong masyarakat pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani untuk mampu memanfaatkan sumberdaya produksi yang dimilikinya sehingga mampu memproduksi secara efisien dan menjamin pemenuhan pangan serta memperoleh surplus yang dapat dipasarkan.

Pada beberapa masyarakat lokal, telah tumbuh beberapa institusi tradisional yang selama ini telah dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai kegiatan produksi yang lebih efisien disesuaikan dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh masyarakat setempat. Dalam studi yang dilakukan Subejo dan Iwamoto (2003), telah dapat diidentifikasi bahwa masyarakat lokal di daerah dataran tinggi Yogyakarta dengan keterbasan sumberdaya produksi telah mengorganisasikan diri ke dalam kelompok atau grup melalui institusi pertukaran kerja (*labor exchange institutions*) yang ternyata sangat efisien dan efektif.

Terkait dengan **mekanisme pasar/ekonomi**, sebenarnya telah banyak upaya untuk menciptakan institusi ekonomi/pasar dengan maksud meningkatkan akses petani atau masyarakat terhadap pasar. Namun nampaknya kelembagaan ekonomi yang ada belum dapat sepenuhnya memberikan manfaat kepada petani secara ekonomi. Pembentukan koperasi pedesaan yang diarahkan pada penyediaan sarana produksi dan penjualan produk pertanian di beberapa tempat menunjukkan keberhasilan, namun pada banyak kasus justru mengalami kegagalan karena tidak melibatkan masyarakat secara penuh. Manfaat dan keuntungan baru dinikmati secara signifikan oleh pihak

tertentu. Idealnya koperasi petani berperan dalam penyediaan sarana produksi, permodalan maupun pemasaran produk lainnya.



Gambar 1. Proses dan Keterkaitan Pemberdayaan Masyarakat dan *Sustainable Development*

Subejo dan Iwamoto (2003) mengidentifikasi bahwa beberapa institusi lokal-tradisional terkait dengan ekonomi/pasar yang sebenarnya sudah mulai dikembangkan oleh masyarakat secara swadaya (*self-organizing*). Munculnya kelompok simpan pinjam tradisional (arisan) yang secara luas dikenal dengan *rotation saving and credit associations* (ROSCAs) merupakan sumber permodalan lokal antar petani merupakan salah satu wujud pemberdayaan petani secara internal. Di daerah pegunungan Gunung

Kidul dengan keterbatasan sumberdaya alam dan ekonomi, masyarakat lokal secara kreatif menciptakan lembaga institusi lokal yang disebut dengan “*prayaan*²” yang menggabungkan prinsip ekonomi pasar dan keeratan hubungan sosial yang dikembangkan untuk berbagai kegiatan produktif.

Sadjad (2000) berpendapat bahwa selama ini program pemberdayaan petani secara ekonomi masih *on farm centralism*. Mestinya pemberdayaan lebih diarahkan supaya tumbuh rekayasa agribisnis sehingga petani desa bisa menjadi pelaku bisnis yang andal dan akhirnya bisa menjadi pusat bisnis masyarakat pedesaan yang menyejahterakan. Pembangunannya harus dari hilir, yaitu pasar yang melalui komponen tengah ialah agroindustri, baru hulunya *on farm business*.

Sustainable development mensyaratkan adanya pengelolaan sumberdaya ekologi secara bijaksana oleh warga masyarakat lokal. Dalam hal ini **mekanisme ekologi** mencakup aspek lingkungan sekitar yang sangat luas bagi masyarakat. Termasuk di dalamnya bagaimana masyarakat diberi kesempatan dan didorong untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya ekologi-nya secara berkesinambungan, termasuk di dalamnya fasilitas infrastruktur (saluran irigasi, jembatan, jalan, fasilitas publik lainnya), hutan masyarakat, penggembalaan umum, gunung, sungai dan lain sebagainya. Beberapa ahli banyak memberikan kritik bahwa selama ini masyarakat cenderung hanya dilibatkan sebagai obyek dalam pengelolaan sumberdaya ekologi, mereka jarang sekali dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan serta pengelolaan sumberdaya ekologi tersebut. Namun hasil penelitian Subejo dan Iwamoto (2003) menunjukkan bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kearifan dan kemampuan dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya ekologi agar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Di daerah pegunungan Yogyakarta dimana fisik ekologi sangat tidak menguntungkan untuk produksi pertanian yang dicirikan dengan perbukitan batuan kapur dan lahan kering, masyarakat lokal telah menciptakan institusi kerja lokal yang bisa difungsikan untuk mengelola sumberdaya ekologi secara optimal misalnya untuk membangun dan memperbaiki teras-teras, pembuatan kolam penampungan air (untuk rumah tangga maupun ternak). *Collective action* tersebut selain mampu merubah lahan kritis menjadi

² Secara lebih detail, karakteristik, fungsi dan mekanisme kerja dari institusi “*prayaan*” dilaporkan dalam riset Subejo (2004)

lahan produktif juga memberikan kontribusi nyata dalam pelestarian sumberdaya ekologi dan konservasi lahan.

Terkait dengan **mekanisme sosial**, sebagian besar masyarakat di Indonesia dikenal sebagai salah satu masyarakat di dunia yang mempunyai tradisi komunitarian paling kuat (Scott, 1976). Tradisi komunitarian tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk *social relationship* yang kuat, masyarakat kita telah banyak berinovasi dalam menciptakan *social relationship* yang memberikan manfaat kepada warganya. Para ahli telah mangacu *social relationship* sebagai suatu *networking* yang secara spesifik sering disebut dengan terminologi *social capital* (untuk lebih jelas lihat dalam *homepage World Bank*³). Saat ini sudah ada kesepahaman bahwa *social capital* memiliki peran penting dan positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Transaksi-transaksi ekonomi akan berjalan dengan lebih efisien jika didukung dengan *social relationship* yang mantap dan kuat.

Secara umum kemampuan *social relationship* di pedesaan kita masih kuat. Sebagai contoh kasus, meskipun di daerah pedesaan yang memiliki mobilitas dan akses tinggi misalnya yang terletak di pinggiran kota, masyarakatnya masih memberikan prioritas yang tinggi terhadap hubungan sosial pada saat kejadian darurat (kematian, kebakaran, longsor, banjir, dan lain sebagainya), pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik, pekerjaan yang terkait dengan permintaan bantuan (pembangunan rumah, upacara-upacara). Hubungan sosial di daerah pegunungan umumnya masih sangat kuat dan mengakar termasuk kesediaan untuk saling membantu dalam pengerjaan usahatani dan pekerjaan rumahtangga lainnya. *Corporate action and function* dari pemimpin-pemimpin lokal juga masih berperan penting dalam mendukung berlangsungnya *social relationship* antar warga masyarakat yang mantap

TAHAPAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT

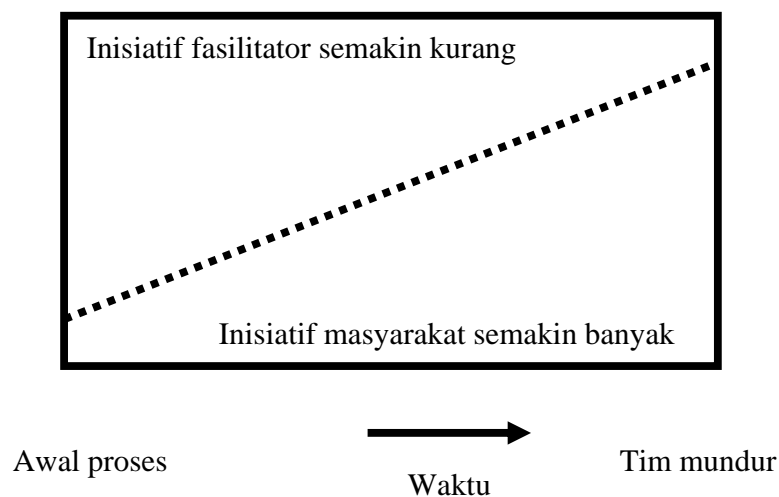
Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengecilkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Meskipun dari beberapa contoh kasus yang disebutkan sebelumnya faktor internal

³ Laporan-laporan hasil studi *World Bank* tentang *social capital* dapat diakses melalui <http://worldbank.org/poverty/scapital/>

sangat penting sebagai salah satu wujud *self-organizing* dari masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya.

Seperti yang dilaporkan Deliveri (2004), proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu *external factor* dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat (PM) akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim PM sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.

Waktu pemunduran tim PM tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program antara tim PM dan warga masyarakat. Berdasar beberapa pengalaman dilaporkan bahwa pemunduran Tim PM dapat dilakukan minimal 3 tahun setelah proses dimulai dengan tahap sosialisasi. Walaupun tim sudah mundur, anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai penehat atau konsultan bila diperlukan oleh masyarakat. Secara skematis, mekanisme pembagian peran menurut periode antara tim PM dan kelompok masyarakat dalam dalam proses pemberdayaan masyarakat disajikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Proses Pembagian Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat⁴ dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut:

Tahap 1. Seleksi lokasi

Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat:

- Kajian keadaan pedesaan partisipatif
- Pengembangan kelompok
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
- Monitoring dan evaluasi partisipatif

Tahap 4. Pemandirian Masyarakat

PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat *top-down* perlu direorientasikan menuju pendekatan *bottom-up* yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal dengan semboyan "*put the farmers first*". Menurut Nasikun (2000:27) paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya; termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akan lebih adil bagi masyarakat.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal,

⁴ Diadaptasi dari Tim Deliveri, 2004, Pemberdayaan Masyarakat dalam Praktek, 2-11, http://www.deliveri.org/guidelines/how/hm_7/hm_7_summaryi.htm.

memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

Salah Satu pola pemikiran lain yang perlu ditelaah lanjut dalam merumuskan strategi “pemberdayaan masyarakat” adalah apakah perlu juga didukung dengan upaya “peradaban masyarakat”. Cukup banyak kasus-kasus empiris yang menggugah kesadaran kita karena mengindikasikan terjadinya semacam *moral degradation* dalam masyarakat, misalnya dengan merebaknya *illegal logging*, penjarahan, manipulasi dalam kelompok, *opportunistic behaviours*, *rent seeking* dan lain sebagainya yang kadang kala melibatkan sebagian anggota masyarakat kita serta pihak yang terkait dengannya. Nampaknya perlu dikaji lanjut apakah sebelum ada *real action* pemberdayaan masyarakat perlu didahului dengan peradaban masyarakat atau justru kedua hal tersebut dapat diimplementasikan secara bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Antholt, C.H, 2001, *Agricultural Extension in the Twenty-First Century* dalam Eicher dan Staatz (eds). 2001. International Agricultural Development. Third Edition. Johns Hopkins.
- Bartle, Phil, 2003, *Key Words C of Community Development, Empowerment, Participation*: <http://www.scn.org/ip/cds/cmp/key-c.htm>).
- Biro Pusat Statistik Jakarta. 2002. *Employment* dalam Biro Pusat Statistik *online://www.bps.go.id/sector/employ/table2.html*
- Cook, James B, 1994, *Community Development Theory*, Community Development Publication MP568, Dept. of Community Development, University of Missouri-Columbia).
- Delivery, 2004a, *Pemberdayaan Masyarakat*, http://www.deliveri.org/guidelines/policy/pg_3/pg_3_summaryi.htm
- Giarci, G.G, 2001, *Caught in Nets: A Critical Examination of the Use of the Concept of “Network” in Community Development Studies*, Community Development Journal Vol.36 (1): 63-71, January 2001 , Oxford University Press).
- Mubyarto dan Santosa, Awan, 2003, *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan: Kritik Terhadap Paradigma Agribisnis*, Jurnal Ekonomi Rakyat Th II No.3 Mei 2003

Nasikun, 2000, *Globalisasi dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas* dalam Fandeli, C dan Mukhlison (eds.), Pengusahaan Ekowisata, Fakultas Kehutanan UGM dan Pustaka Pelajar.

Sadjad, Sjamsoe`oed, 2000, *Memberdayakan Petani Desa*, Kompas 22 September 2000.

Scott, James C, 1976, *The Moral Economy of The Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, New Heaven and London, Yale University Press.

Subejo, 2004, *Customs of Mutual Help in Rural Java: A Case Study of Gotong Royong Practices in Yogyakarta Province*, Master Paper pada The University of Tokyo (tidak dipublikasikan).

Subejo dan Supriyanto, 2004, *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Short paper* pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, *Study on Rural Empowerment (SOREm)*--Dewan Mahasiswa Fak. Pertanian UGM tanggal 16 Mei 2004.

Subejo dan Iwamoto, Noriaki, 2003, *Labor Institutions in Rural Java: A Case Study in Yogyakarta Province*, Working Paper Series No. 03-H-01, Department of Agriculture and Resource Economics, The University of Tokyo.